

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA

PEMEKARAN (TERBENTUKNYA) KABUPATEN KEPULAUAN

ANAMBAS

Studi Kasus pada Kabupaten Kepulauan Anambas Propinsi Kepulauan Riau



Disusun oleh:

Nama : Henderiyana

NIM : 20020520014

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2009

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
SINOPSIS.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL.....	1
B. LATAR BELAKANG MASALAH.....	2
C. RUMUSAN MASALAH.....	7
D. TUJUAN PENELITIAN.....	7
E. MANFAAT PENELITIAN.....	7
F. KERANGKA DASAR TEORI.....	8
1. Otonomi Daerah.....	8
2. Pemerintah Daerah.....	11
3. Bupati.....	15
4. Pemekaran Wilayah.....	19
5. Faktor-Faktor Yang Mendasari Pemekaran.....	24
G. DEFENISI KONSEPTUAL.....	29
H. DEFENISI OPERASIONAL.....	30
I. METODE PENELITIAN.....	31
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Unit Analisa Data.....	33
3. Jenis Data.....	34
4. Tehnik Pengumpulan Data.....	35
5. Tehnik Analisa Data.....	36
BAB II. DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN.....	
A. Sejarah Singkat.....	39
1. Sejarah Kabupaten Kepulauan Anambas Sebelum Pemekaran.....	39
B. Kondisi Geografis.....	40
1. Batas Wilayah.....	40
2. Letak Geografis.....	41
C. Kondisi Demografis.....	42
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	42
2. Agama dan Tempat Ibadah.....	42
3. Kondisi Sosial Budaya.....	43
4. Aspek Ekonomi.....	46
5. Sosial Politik.....	48

D. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.....	49
1. Visi dan Misi.....	50
2. Letak Administratif.....	51
BAB III. ANALISA DATA.....	52
A. Analisis Faktor Syarat Administratif, Teknis dan Fisik.....	52
1. Faktor Sosial Politik dan Sosial Budaya.....	52
2. Faktor Hukum dan Pemerintahan.....	56
3. Faktor Luas Rentang Kendali.....	59
4. Faktor Potensi Daerah.....	60
5. Faktor Syarat Administratif.....	67
6. Faktor Pertahanan dan Keamanan.....	68
B. Dinamika Politik.....	70
1. Aspek Historis.....	70
2. Aspek Tarik Ulur Kepentingan Politik.....	71
C. Anambas Pasca Pemekaran.....	77
1. Tingkat Kesejahteraan.....	77
2. Pelayanan Publik.....	79
 BAB IV. PENUTUP	 80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SINOPSIS

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Kabupaten Termuda di Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan pada tanggal 23 Juni Tahun 2008. Melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 Tentang : Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau. Proses pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas melalui perjuangan yang lumayan panjang dan sempat tertunda pembahasannya dikarenakan persyaratan administrasi yang tidak lengkap. Penolakan Kabupaten induk juga mewarnai proses pembentukan Kabupaten baru ini ditambah dengan dinamika politik serta tarik ulur kepentingan politik, menarik untuk diteliti sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti menyusun skripsi dengan judul “ **FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA PEMEKARAN (TERBENTUKNYA) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**”.

Untuk dapat menjelaskan dan menggambarkan secara objektif sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, data yang diperoleh tidak dianalisis secara statistik tetapi data-data yang terkumpul disusun dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua faktor besar yang berpengaruh dalam proses terbentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas. Pertama, Faktor syarat administrative, teknis dan fisik yang mencakup (1) Faktor Sosial Politik dan Sosial Budaya. (2) Faktor Hukum dan Pemerintahan. (3) Faktor Luas Rentang Kendali. (4) Faktor Potensi Daerah. (5) Faktor Syarat Administratif. (6) Pertahanan dan Keamanan. Kedua, Dinamika Politik yang mencakup (1) Aspek Historis. (2) Aspek Politis (tarik ulur kepentingan politik). Faktor luas rentang kendali merupakan alasan utama dibentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas. Karena faktor inilah yang menjadi akar masalah gagalnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang pernah dijanjikan oleh Bupati Natuna. Jarak tempuh yang sangat tidak efektif menyebabkan Kepulauan Anambas terisolir oleh akses pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna. Selain itu, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas motif-motif terselubung seperti sejarah masa lalu, keinginan untuk memperoleh kekuasaan dan jabatan juga mempengaruhi. Ada tarik ulur kepentingan antara Pemerintah pusat, Kabupaten Induk dan elit-elit politik Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam proses pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas. Pusat menaruh kepentingan terhadap kedaulatan NKRI di pulau ujung utara tersebut. Sementara Natuna menginginkan Sumberdaya alam minyak dan laut yang dimiliki oleh Kepulauan Anambas.

Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas maka ada beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dari pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas agar pemekaran wilayah tidak hanya menguntungkan pihak-pihak yang memang mempunyai motif yang tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Pendidikan, ketersediaan sarana transportasi yang mampu menjembatani akses pelayanan anatara

Kabupaten dengan kecamatan-kecamatan, antara Kabupaten Kepulauan Anambas dengan daerah-daerah lain dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau. ketersediaan infrastruktur dan pengamanan terhadap sumberdaya laut yang melimpah ruah, juga harus menjadi prioritas dalam pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, dalam rangka mewujudkan cita-cita dari otonomi daerah.